

Muhammadiyah dan Politik 2024

Teguh Raharjo¹, Khorida AR², Yuri Febriyanti³, Miftahul Jannah⁴

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang; teguhfasa@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Tangerang; khoridakampus@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Tangerang; rie_yuri25@yahoo.co.id

⁴Universitas Muhammadiyah Tangerang; reyenclara@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Muhammadiyah; Politik;

Article history:

Received January 3, 2024

Revised January 21, 2024

Accepted January 21, 2024

Corresponding Author:

*TeguhRaharjo
Universitas Muhammadiyah
Tangerang;
teguhfasa@gmail.com*

CopyRight:

*This is an open access article under
the [CC BY-NC-SA](#) license.*



ABSTRACT

Muhammadiyah as one of the largest mass organizations in Indonesia which focuses more on religion, education and social affairs cannot be separated from the political situation in Indonesia. Moreover, 2024 is a political year for Indonesia, including the election of the President and Vice President. The author's background is to discuss in more depth, specifically who Muhammadiyah's vote will be in the 2024 Presidential and Vice Presidential Election. The aim of the research is to find out Muhammadiyah's movement in the political year. With the method of collecting existing data both in electronic media and in other media. So that the final conclusion can be drawn regarding Muhammadiyah's votes in the 2024 political year.

ABSTRAK

Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas terbesar di Indonesia yang bergerak lebih kepada keagamaan, Pendidikan dan Sosial tidak bisa terlepas dari situasi politik yang ada di Indonesia. Apalagi di Tahun 2024 adalah tahun politik bagi Indonesia diantaranya pemilihan Presiden dan Wakil presiden. Latar belakang penulis membahas lebih kepada untuk mengetahui lebih dalam khususnya suara Muhammadiyah akan berlabuh kepada siapa di Pemilihan Presiden dan Wakil presiden 2024. Tujuan penelitian adalah mengetahui gerakan Muhammadiyah di tahun politik. Dengan Metode mengumpulkan data- data yang ada baik di Media elektronik maupun di media lainnya. Sehingga bisa di tarik kesimpulan terakhir terkait suara Muhammadiyah di Tahun politik 2024.

1. PENDAHULUAN

Identitas persyarikatan Muhammadiyah, sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 1 ayat 1 dinyatakan sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, beragidah Islam dan bersumber pada Al-Our'an dan Sunnah. Namun demikian, dilihat dari gerak pemikiran dan pengamalan keagamaannya, Muhammadiyah tidak hanya dikenal sebagai gerakan Islam dan dakwah, tetapi juga sebagai gerakan tajdid.

Oleh karena itu identitas perjuang-an Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam, dakwah dan tajdid. Ketiga identitas tersebut akan dibahas dalam paparan berikut:

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Untuk melaksanakan dan memperjuangkan keyakinan dan cita-cita hidupnya, Muhammadiyah selalu mendasarkan pada prinsip-

prinsip ajaran Islam, yaitu karena adanya keyakinan bahwa hanya Islamlah ajaran yang mampu mengatur tata kehidupan manusia yang dapat membawa pada kesejahteraan hidup di dunia dan akherat. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah*, Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan keyakinan, Muhammadiyah melakukan dakwah Islam, yaitu seruan dan ajakan kepada seluruh umat manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dakwah ini dilakukan melalui amar ma'ruf nahi mungkar, sasaran dakwah Muhammadiyah ditujukan kepada perseorangan dan masyarakat. Dakwah untuk perseorangan ditujukan kepada yang telah beragama Islam (bersifat pemurnian) dan yang belum beragama Islam (bersifat seruandan ajakan untuk memeluk agama Islam). Sedangkan dakwah untuk masyarakat dilakukan dalam rangka perbaikan hidup, bimbingan serta peringatan untuk selalu melakukan yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajdid*, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid karena Muhammadiyah selalu berupaya melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai pemikiran dan pengamalan keagamaan dalam rangka pemurnian dalam bidang agidah dan ibadah yang disesuaikan dengan al-Our'an dan Sunnah, dengan kata lain "kembali kepada al-Our'an dan Sunnah". Di samping itu Muhammadiyah juga selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan, yang disesuaikan dengan kemajuan zaman dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip Islam.

Pengertian tajrid dan tajdid Istilah *tajrid* berasal dari bahasa Arab berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, Pelepasan atau pengambil alihan. Sedangkan *tajrid* dalam bahasa Indonesia berarti *pemurnian*. Istilah ini, tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid, sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Dalam ibadah kita *tajrid*, hanya ikut Nabi saw. dan tidak ada pembaruan. Sedang dalam muamalah kita *tajdid*, yakni melakukan modernisasi dan pembaruan. Istilah *tajdid* berasal dari bahasa Arab yaitu *jaddada*, yang berarti memperbaharui atau menjadikan baru. Kata ini pula bentukan dari kata *jadda*, *yajiddu*, *jiddan/jiddatan*, artinya sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik dan baru. Bisa juga berarti membangkitkan, menjadikan, (muda, tangkas, kuat). Dapat pula berarti memperbaharui, memperpanjang izin, dispensasi, kontrak. Adapula scara istilahi sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Syatibi, seperti dikutip oleh Syaikh Alawi, tajdid berarti menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya, dan memurnikan pemahaman dan pengalaman agama islam dari hal-hal yang tidak berasal dari islam (Alawy Bin Abdul Qadir As-Saqaf, 2001:22)

Dalam kamus Bahasa Indonesia *tajdid* berarti pembaruan, modernisasi atau restorasi. Orang yang melakukan pembaruan disebut mujaddid. Prof. Quraisy Shihab, mengartikan *tajdid* sebagai pencerahan dan pembaruan. Tajdid dalam makna pencerahan mencakup penjelasan ulang dalam bentuk kemasan yang lebih baik dan sesuai menyangkut ajaran-ajaran agama yang pernah diungkap oleh para pendahulu. Adapun tajdid dalam arti pembaruan adalah mempersembahkan sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah diungkap oleh siapapun sebelumnya. Sedangkan istilah modernis (Inggris) atau modernisasi (Indonesia) atau pembaruan, dalam Islam, diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan re-interpretasi terhadap pemahaman, pemikiran dan pendapat tentang masalah ke-Islaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang diperbaharui adalah hasil pemikiran atau pendapat, dan bukan memperbarui atau mengubah apa yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Dengan kata lain, yang diubah atau diperbarui adalah hasil pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Hadis tersebut.

Tajdid dengan pengertian seperti itu, bertujuan untuk memfungsikan Islam sebagai *hudan*, *furgan* dan *rahmatan lilalamin*, termasuk mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, tajdid, bagi

Muhammadiyah, harus senantiasa berpijak dari Al-Our'an dan Al-Sunnah, dan selanjutnya juga bermuara pada implementasi atas nilai-nilai ajaran Al-Our'an dan Al-Sunnah. Artinya, betapapun Muhammadiyah mengadopsi berbagai model pembaharuan dalam aspek pengembangan sumberdaya manusia, manajemen organisasi, strategi dakwah dan kebudayaannya, tetapi Muhammadiyah selalu menunjukkan konsistensinya untuk kembali kepada spirit Al-Our'an dan Al-Sunnah.

Dimensi tajdid dalam Muhammadiyah meliputi: (1) Pemurnian aqidah dan ibadah, serta pembentukan akhlak mulia (al akhlaq al-karimah), (2) Pembangunan sikap hidup dinamis, kreatif, progressif, dan berwawasan masa depan, dan (3) Pengembangan kepemimpinan organisasi dan etos kerja dalam Pesyarikatan Muhammadiyah Putusan Mukhtar Tarjih ke XXII, 1989 di Malang di atas menjadi pijakan Muhammadiyah dalam merespon perubahan masyarakat yang semakin kompleks, baik di bidang nilai-nilai kehidupan, sosial budaya, sosial ekonomi, politik dan sebagainya, dengan pesan pengajaran risalah Islam, yang dipahami secara dinamis dan konsisten terhadap pemurnian ajaran Islam. Dalam konteks tugas khusus Majelis Tarjih dan Tajdid yang membidangi pendalaman pemahaman dan pengamalan ajaran Islam serta pengembangan pemikiran Islam, konsep tajdid di atas menjadi pijakan dalam mengawal perkembangan pemikiran keislaman baik bagi internal Muhammadiyah maupun dalam merespon perkembangan pemikiran Islam secara umum.

Dalam perkembangan sejarah Islam, tajdid juga dipahami sebagai pembaharuan dalam kehidupan keagamaan, baik berbentuk pemikiran maupun gerakan, sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dengan urusan sosial umat Islam. Istilah tajdid atau pembaharuan juga sering digunakan dalam konteks gerakan Islam modern. Istilah ini juga mempunyai akar yang kuat pada Islam klasik (pra modern). Tajdid pada masa klasik biasanya dihubungkan dengan upaya purifikasi untuk memperbaharui iman dan praktik Muslim. Tajdid mempunyai makna memperkuat dimensi spiritual iman dan praktik, seperti terlihat dalam karya al-Ghazali Jhya' 'Ulum al-Din dan karya Ibnu Taimiyah al-Radd 'ala al-Hululiyah wa al-Ittihadiyah. Pada masa modern, tajdid adalah upaya para salafi dan modernis Islam untuk memperkenalkan pengaruh Islam dalam kehidupan Muslim. Dengan demikian, ada dua kecenderungan di sini, yakni kecenderungan salafi dan reformis modernis (Khalil, 1995: 431).

Pertama, kecenderungan gerakan salafi (seperti Muhammad Ibn Abdul Wahhab). Gerakan salafi sama sekali tidak berkaitan dengan pengaruh Barat. Gerakan ini lebih mengutamakan upaya pemurnian aqidah Islam dari bahaya tahayul dan khurafat, juga pemurnian ibadah dari bahaya bid'ah. Gerakan ini berusaha membersihkan praktik dan pemikiran keagamaan dari unsur-unsur asing dengan menekankan pada tauhid. Ziarah dan pensucian atas para wali dan makam mereka ditolak karena mengandung kemusyrikan. Islam harus menjadi petunjuk hidup Muslim. Gerakan ini belum melihat kebutuhan untuk mereinterpretasi Islam agar sesuai dengan kehidupan modern, karena orientasinya pada masalah-masalah aqidah dan ubudiyah (Khalil, 1995: 432).

Kedua, kecenderungan gerakan reformis/modernis (seperti: Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh). Gerakan ini memandang masyarakat muslim gagal menangkap spirit kemajuan dan perkembangan dalam seluruh aspek kehidupan yang telah dicapai Eropa. Para reformis tidak bermaksud mengundang westernisasi. Mereka justru mengkritik kebutaan dunia Muslim dalam melihat cara-cara Barat memperoleh kemajuan, mereka berusaha memperbaiki martabat kebesaran Muslim, dan Arab melalui peremajaan pemikiran dan praktik Islam (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1993: 42). Dengan demikian, gerakan reformis/modernis berkaitan erat dengan Barat: berusaha merespon

tantangan sebagai akibat kontak dengan Barat. Umat Islam sadar akan keterbelakangan dan stagnasi budaya dunia Islam. Mereka tidak hanya yakin bahwa Islam sesuai dengan sains, bahkan percaya bahwa kemajuan Eropa adalah hasil kontribusi peradaban Islam/Arab, mengakui peran akal bahkan menolak bahwa akal tidak sesuai dengan iman. Pembaharuan akan gagal jika ulama Muslim terus menganjurkan taglid. Taglid ditolak karena merupakan faktor terbesar stagnasi budaya di dunia Islam/Arab dan menyebabkan orang beriman tergantung pada tafsir-tafsir lama. Pembaharuan di mata reformis/modernis adalah memperbaharui agama itu sendiri (lihat misalnya penggunaan definisi ini pada judul karya M. Iqbal, *Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi, 1985) bukan karena Islam sudah tidak memadai, tetapi karena interpretasi dan reinterpretasi Islam adalah proses berkesinambungan. Mereka menganjurkan ijtihad, karena dengan ijtihad, problem modernitas dapat direspon dengan jawaban modern.

Perhatian utama para reformis berkaitan dengan upaya perbaikan pendidikan, status perempuan dalam masyarakat, politik, nasionalisme dan upaya modernisasi seluruh aspek kehidupan lainnya. Perbaikan pendidikan meliputi penyerapan sains: dan temuan-temuan baru ke dalam kurikulum institusi belajar Islam: modernisasi pendidikan sipil dengan tujuan untuk memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa. Untuk mendudukkan perempuan pada posisi yang adil, reformis menolak anggapan inferioritas mereka dalam bidang sosial dan hukum. Ketertindasan perempuan di dunia Islam adalah hasil dari kebodohan dan salah tafsir terhadap teks-teks Islam.

Reformis juga memandang keyakinan bahwa ulama tidak harus tunduk pada penguasa politik, kecuali dalam hal-hal yang berbahaya bagi kepentingan Muslim. Ulama hanya tunduk pada Tuhan dan bukan pada penguasa demi upah atau hadiah. Ulama harus berpikir independen dan tahan terhadap tekanan politik. Akhirnya, para reformis juga mengkaitkan upaya pembaharuan dengan kesadaran nasionalisme bangsa-bangsa Muslim untuk menentang penjajahan Eropa dan mendirikan negara-bangsa yang berdaulat. Dengan demikian, pembaharuan meliputi dimensi internal dan eksternal, dan kedua dimensi ini harus didekati secara simultan. Berikut ini adalah contoh tokoh-tokoh utama yang melakukan gerakan pembaharuan Islam klasik dan modern, baik salafi maupun reformis.

Muhammadiyah telah berdiri 18 November tahun 1912 Masehi silam. Keberadaannya sebagai civil society atau organisasi kemasyarakatan yang mencurahkan perhatian utamanya pada bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan patut diapresiasi. Namun tidak hanya itu, sebagai organisasi masyarakat atau civil society Muhammadiyah telah menjalankan fungsi politiknya dalam kehidupan nasional Muhammadiyah telah berkiprah untuk pergerakan kebangkitan kebangsaan, meletakkan fondasi Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dan mengakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dalam konstitusi dan cita-cita kemerdekaan, serta memelihara politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan ideologi dunia. Sebagaimana Mitsuo Nakamura menyebutkan, Muhammadiyah sejak berdirinya memiliki konstribusi positif yang paling menonjol sebagai civil society, di antaranya; pertama, Muhammadiyah menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dengan ikut membangun dan mengembangkan keberadaan Republik Indonesia sejak berdirinya. Kedua, Muhammadiyah adalah wadah yang berperan dalam mengembangkan inisiatif warga secara mandiri.

Tokoh-tokoh Muhammadiyah sejak kelahirannya seperti KH. Ahmad Dahlan, Mas Mansur, Kahar Muzakkar, Ki Bagus Hadikusumo, Jendral Besar Soedirman, Kasman Singodimejo, Buya Hamka, dan lain-lain merupakan tokoh-tokoh bangsa yang dikenal kiprah kebangsaannya di negeri ini. Kendati dalam dinamika politik ikut menyertai perjalanan Muhammadiyah, namun Muhammadiyah sejak kelahirannya tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik manapun, serta konsisten bergerak pada

ranah dakwah dan tajdid yang bersifat pencerahan. Namun Muhammadiyah bukan pula anti politik. Hal ini bisa merujuk pada khittah (garis perjuangan) Muhammadiyah.

Kontribusi politik Muhammadiyah, sebagaimana posisinya sebagai civil society adalah pembinaan masyarakat dan berperan aktif dalam fungsi kritik dan masukan terhadap Negara. Bagi Muhammadiyah, politik yang dikembangkannya adalah politik nilai yang tidak pernah jauh dari rakyat, sehingga ranah politik yang dikembangkannya adalah ranah politik yang selalu berpihak pada nilai, termasuk kaum mustadh'afin. Melalui prinsip-prinsip khittah yang telah dikembangkan, Muhammadiyah tidak hanya menggunakan khittah-nya tersebut sebagai pedoman untuk tidak terlibat dalam politik praktis untuk merebut kekuasaan, karena lebih memfokuskan pada gerakan dakwah, tetapi juga pedoman untuk bertindak untuk selalu kritis dan peduli terhadap masalah bangsa dan negara.

Sebagaimana yang disebutkan dalam poin kelima pada Khittah Denpasar 2002: "Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan memengaruhi proses kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban." Melalui pendekatan teori civil society yang dikembangkan Alexis de Tocqueville yang telah dijabarkan di atas menegaskan Muhammadiyah pada posisinya sebagai civil society memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan politik. Sebab melalui teori civil society yang dikembangkan oleh Alexis, Muhammadiyah berada dalam posisi sebagai negosiator masyarakat untuk menyalurkan aspirasi ke pemerintah untuk memengaruhi kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan cita-cita luhur bangsa.

Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa Muhammadiyah dalam menjalankan peran politik di usianya memasuki abad kedua saat ini perlu adanya sikap konsistensi terhadap khittahnya dalam berperan aktif menjadi jembatan bagi masyarakat menghadapi permasalahan bangsa. Karenanya dalam peristiwa sejarah dan persentuhannya dengan perpolitikan nasional, Muhammadiyah sering kali dianggap telah keluar dari tujuan organisasi, yang sejatinya Muhammadiyah adalah sebuah organisasi kemasyarakatan berbasis agama yang mencurahkan perhatiannya di bidang sosial, dan pendidikan, misalnya keterlibatan Muhammadiyah yang terlalu praktis dalam berpolitik, seperti pengalaman keterlibatan Muhammadiyah dalam anggota istimewa Masyumi dan menginisiasi berdirinya Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), atau yang terbaru keterlibatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sewaktu melakukan aksi dukung mendukung secara eksplisit terhadap salah satu calon presiden pada Pemilu 2004 telah mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit.

Muhammadiyah dijadikan basis dukungan massa partai politik, serta fokus dakwah kemasyarakatan Muhammadiyah mulai teracuhkan. Dengan segala pencapaiannya sepanjang satu abad silam berada dalam posisi yang tepat sehingga pantas untuk meningkatkan kontribusinya kepada warga negara dan bangsa Indonesia di usianya pada awal abad kedua saat ini. Penelitian ini menjelaskan bagaimana sesungguhnya kedudukan peran, sikap dan fungsi politik yang diambil oleh Muhammadiyah dalam memposisikan dirinya sebagai civil society dan bagaimana aktualisasi peran politiknya tersebut memasuki usia yang kedua abad saat ini yang dimulai sejak Mukhtamar ke-46 tahun 2010 hingga menjelang Pemilu 2014

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam menggunakan teknik penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif laporan penelitian berisikan kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terhadap penyajiannya. Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan jenis data skunder. Jenis data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara. Sedangkan jenis data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder, dan peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Model Alir (flow model), yaitu analisis data yang dimulai dari mereduksi dan menelaah data yang telah didapat, yang dimulai dengan pengumpulan data sekunder atau dokumentasi dan dari hasil penelitian terdahulu dengan cara membuat abstraksi, menentukan perumusan masalah dan fokus masalah. Selanjutnya dengan cara mendiskripsikan data, yaitu dengan cara menyusun data dan informasi ke dalam teori yang telah ditentukan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan, berupa temuan baru dan jawaban dari masalah penelitian.

3. PEMBAHASAN

Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti, berikan imbauan kepada warga perserikatan Muhammadiyah harus terlibat aktif dalam proses politik, tidak boleh pasif, dan tidak boleh antipati.

Sementara keaktifan tersebut, bisa dibuktikan dalam bentuk partisipasi yang bersifat konstruktif seperti terlibat di proses politik, menjadi warga negara yang kritis, dan komunitas yang dapat menjadi teladan bagi komunitas lain terutama dalam menyikapi perbedaan pilihan politik. Hal itu terungkap, saat Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia bekerjasama dengan PP Muhammadiyah, menggelar kegiatan Internalisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Keadaban Digital di Stikes Muhammadiyah, Jalan Raya Kalibakung-Guci, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (26/10/2023).

"Kami (Muhammadiyah) secara kelembagaan tidak kemana-mana dalam artian tidak terlibat pada politik praktis. Tetapi warga Muhammadiyah secara pribadi silahkan bertebaran dimana-mana, silahkan tentukan pilihan yang tentunya sesuai garis kebijakan perserikatan yakni memilih yang terbaik, berkompeten, dan menghindari berbagai bentuk kecurangan maupun praktik politik yang memecah belah umat dan bangsa," ungkap Abdul Mu'ti. Sementara menanggapi jika ada pimpinan maupun anggota Muhammadiyah yang menjadi calon, Abdul Mu'ti mengatakan tidak perlu mundur melainkan cukup non aktif saja terlebih dahulu. Nantinya jika terpilih atau menyelesaikan segala proses yang ada, silahkan mengambil keputusan apakah tetap bergabung di pimpinan atau memilih sebagai legislatif.

Sedangkan soal partai, Abdul Mu'ti menyebut Muhammadiyah tidak mengarahkan harus memilih salah satu partai politik. Dengan kata lain pilihan partai terserah pada pribadi masing-masing sesuai yang disukai atau dikehendaki. "Sesuai edaran, secara kelembagaan Muhammadiyah tidak membuka pintu bagi yang ingin berkampanye di lembaga pendidikan maupun di amal usaha. Tetapi ada aspirasi baru dari beberapa rektor untuk kampus tertentu diizinkan, tapi ya nantinya bukan kampanye yang sifatnya mengerahkan masa, melainkan debat atau uji gagasan masing-masing capres dan cawapres. Tapi ya ini sifatnya masih dimungkinkan dan sangat terbatas," ujarnya.

Muhammadiyah perlu hadir di tengah kontestasi politik 2024 untuk menegaskan nilai-nilai politik dan demokrasi. Namun Muhammadiyah tidak ada kaitannya

dengan pemilihan umum 2024 karena Muhammadiyah hanya organisasi kemasyarakatan (ormas), bukan kontestan. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Ma'mun Murod, M.Si., dalam Seminar Nasional Forum Dekan FISIP PTMA yang digelar di Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ, Rabu (21/06/2023). Ma'mun juga mengungkapkan bahwa untuk membangun suatu bangsa itu diperlukan peran nyata politik dalam melakukan transformasi sosial. "Muhammadiyah tidak memiliki kaitan langsung dengan Pemilu 2024. Muhammadiyah berkomitmen dan konsisten tidak terlibat dalam manuver politik partai manapun. Namun bukan berarti buta politik atau anti politik," ungkap Ma'mun.

Tidak hanya itu, Ma'mun juga menambahkan bahwa Muhammadiyah memiliki dua makna pembeda dalam bidang politik. Pertama, Muhammadiyah sebagai Jam'iyah atau organisasi yang tidak diperkenankan untuk membuat keputusan apapun yang bersifat praksis atau praktis. Kedua, Muhammadiyah sebagai Jama'ah atau kultural sebagai penggerak untuk melakukan penguatan-penguatan politik. Lebih jauh Ma'mun mengungkapkan rencana Lembaga Leader of Indonesia (UMJ) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang akan mengadakan survei terkait pengamatan politik menjelang pemilu 2024. Survei ini membutuhkan 3.600 responden dari luar Muhammadiyah dan 2.400 dari masyarakat Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam menyikapi rezim politik tentu memiliki sikap tersendiri karena selama ini aktif terlibat dalam membangun sekolah, pesantren, hingga perguruan tinggi Islam untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada masyarakat. "Bukan negara yang telah banyak memberi ke Muhammadiyah, namun Muhammadiyah yang telah banyak memberi untuk Negara. Padahal mencerdaskan bangsa adalah tugas negara, bukan Muhammadiyah," jelas Ma'mun.

Oleh karena itu, menurut Ma'mun, kader Muhammadiyah harus memahami arus politik tidak boleh terlalu kasar, tapi jangan terlalu lunak. Banyak hal yang harus dikritisi oleh kader Muhammadiyah karena politik juga penting untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Seminar Nasional Forum Dekan FISIP PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah) ini dihadiri oleh Dekan FISIP UMJ Dr. Evi Satipsi, M.Si., Ketua Fordek PTMA Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si., Ketua LHKP PPM Dr. Phil Ridho Al-Hamdi, M.A., para Dekan FISIP dari 18 PTMA se-Indonesia, dan sivitas akademika FISIP UMJ. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ Dr. Evi Satipsi, M.Si., dalam sambutannya mengatakan seminar ini diselenggarakan untuk membahas bagaimana peran Muhammadiyah di tengah kontestansi politik 2024. Karena ada harapan keanggotaan badan legislatif juga bisa diisi oleh kader Muhammadiyah.

Selaras dengan itu, Ketua Forum Dekan FISIP PTMA, Prof. Dr. Muslimin Mahmud M.Si., berharap Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dapat memerankan fungsinya untuk menjadi penengah dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Muslimin, peran Muhammadiyah adalah membangun peradaban bangsa. Oleh sebab itu Seminar Nasional ini menjadi momentum penting dalam melakukan perubahan bersifat substantif, untuk mentransformasikan demokrasi politik yang bermoral dan beradab. "Di tengah maraknya isu politik, ini menjadi kesempatan besar untuk mendorong kader Muhammadiyah yang memiliki potensi dalam bidang politik untuk masuk ke dalam dunia politik. Karena sebagai kader Muhammadiyah tentu harus paham politik untuk membangun kembali cita-cita bangsa dan negara," jelasnya.

Menjelang hadapi Pemilu 2024, Muhammadiyah harus seksama dalam menghadapi situasi politik, dan memandangnya dengan multi perspektif dan aspek. Demikian pandangan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir yang disampaikan pada (30/9) dalam Agenda Rakernas Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pandangan yang multi

perspektif ini menurutnya yang digunakan oleh PP Muhammadiyah dalam melihat berbagai dinamika perkembangan politik Indonesia saat ini, jadi bukan karena takut dan lain sebagainya. “Karena kita organisasi besar Islam yang memiliki signifikansi dan pengaruh dalam kehidupan dan kebangsaan, yang itu tidak bisa dibeli dengan kuantitas,” tutur Haedar.

Guru Besar Bidang Sosiologi ini mengenaskan, saat ini Muhammadiyah senantiasa memperbaiki kekurangan yang ada pada tubuhnya, dengan tujuan untuk menjadi organisasi Islam yang terbesar di muka bumi.

Menjaga Pandangan Politik Muhammadiyah

Kebesaran Muhammadiyah harus dijaga, tidak boleh tergerus hanya karena urusan politik pragmatis yang memang bertujuan untuk kekuasaan. Sedangkan peran politik Muhammadiyah itu berbeda, yakni politik kebangsaan atau high politics. “Ada politik kebangsaan yang dalam istilah kita itu politik kenegaraan, yang menjadi bidang garap Muhammadiyah. Dan ini sudah berlangsung lama, dan itu merupakan pilihan dan ijtihad politik,” tutur Haedar.

Oleh karena itu, kepada para kader persyarikatan harus pandai dan bisa meletakkan pandangan politiknya sebagaimana putusan yang telah disepakati oleh organisasi. Sebab sebagaimana kehidupan lain, politik juga mengandung sisi praktis, dan idealis.

“Lalu dinamikanya juga seperti dinamika kehidupan lain, yang tidak selalu linier. Karena selalu ada multi aspek yang saling mempengaruhi, maka itulah yang sering disebut cross cutting of interest,” katanya. “Maka akan keliru jika memandangnya hanya dari satu sudut pandangan,” imbuhnya.

Dalam sudut pandangan teologis, Muhammadiyah melihat politik sebagai urusan muamalah duniawiyah, seperti urusan ekonomi, dan seterusnya. Berangkat dari pandangan tersebut, Muhammadiyah memilih jalur politik kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. “Ini berbeda dengan pandangan integralistik atau utopis, bahwa politik itu sama dan sebangun dengan Islam itu sendiri. Atau yang sekuler, bahwa urusan politik sebagaimana urusan dunia, urusan politik harus dipisahkan dari urusan agama,” tutur Haedar.

Titik bedanya adalah Muhammadiyah dengan pandangan Islam yang modernis, reformis, dan moderat tidak melihat adanya ajaran yang detail, tunggal, dan konkrit mengenai politik, termasuk sistem kekuasaan dalam Islam. Pandangan tersebut memiliki dasar dari dalam Islam. Haedar menjelaskan, setelah melakukan pemeriksaan atau penelitian, juga tidak ada konsep kepemimpinan yang sophisticated dalam Islam.

Dalam Dialog Terbuka Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menanggapi salah satu pertanyaan dari panelis, di Bidang Pendidikan, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Rektor UMS Prof., Dr., Sofyan Anif., M.Si., mempertanyakan tiga poin. Poin pertama, rata-rata jumlah warga memiliki pendidikan yang rendah di Indonesia, poin kedua tentang kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru, dan terakhir menhenai kebijakan Perguruan Tinggi Nasional Berbadan Hukum (PTNBH) yang berdampak terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS), baik milik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam Dialog Terbuka yang diselenggarakan di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Anies Baswedan menanggapi poin pertama terkait jumlah warga Indonesia yang berpendidikan rendah dengan cara mengembalikan yang putus sekolah kembali ke sistem sekolah. Cara tersebut dilakukan dengan mengintensifkan kesetaraan sekolah mulai dari Paket A sampai Paket C dan memberikan insentif kepada para pengajar.

"Dalam memberantas angka warga Indonesia yang masih berpendidikan rendah, dengan cara kejar paket," ungkap Capres nomor urut 1 itu, Rabu (22/11). Kemudian, poin kedua terkait kebijakan PPPK guru, negara harus menghargai mereka yang berkiprah dalam lembaga pendidikan milik swasta.

"Mengabdikan di Indonesia tidak harus menjadi pegawai negeri, sehingga guru swasta itu juga berkontribusi atas kemajuan pendidikan. Apalagi sekolah swasta di Muhammadiyah dan NU ini sudah mencerdaskan bangsa bahkan sejak negara Republik Indonesia belum berdiri," tegas Anies Baswedan.

Maka dari itu, lanjutnya, sekolah sampai perguruan tinggi swasta harus bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tanpa sekolah swasta, negara tidak bisa mewadahi banyaknya anak-anak Indonesia. Anies akan mempersilakan kepada sekolah swasta, agar tanah negara dapat dimanfaatkan oleh sekolah swasta untuk mendidik generasi penerus bangsa.

"Sehingga negara hadir bukan hanya untuk memberikan bantuan fiskal, tetapi harus mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah swasta di Indonesia," ujar Anies.

Anies-Imin, menjawab cecaran yang diberikan oleh panelis pakar di Bidang Hukum dan Demokrasi, saat mengikuti Dialog Terbuka Muhammadiyah. Pakar di bidang Hukum dan Demokrasi, Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anies-Imin. Aidul Fitriciada mengajukan pertanyaan dengan membandingkan tingkat korupsi di Indonesia dengan China. Aidul Fitriciada menyampaikan, data terakhir pada bulan September tentang indeks negara hukum global, Indonesia menempati pada rank 66 dari 142 dengan skor 0.54. Tapi di sisi lain, China dengan peringkat lebih rendah, yaitu rank 97 dari 142 negara yang disurvei.

"Jangan-jangan masyarakat kita lebih suka negara yang aman, dibandingkan dengan negara yang bersih?" pikir Mantan Ketua Komisi Yudisial itu. Menimbang bahwa korupsi di China parah tetapi tingkat ketertiban dan keamanan tinggi. Lantas Anies Baswedan menanggapi pertanyaan tersebut. Dia menilai ketika korupsi dibiarkan, mungkin akan menciptakan kenyamanan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang itu akan menciptakan ketimpangan yang bisa meletup menjadi masalah sosial.

"Karena begitu ada korupsi, otomatis itu artinya kebijakan-kebijakan yang seharusnya dirasakan oleh orang banyak, dana yang seharusnya bisa dirasakan oleh semua, berhenti di kelompok-kelompok tertentu saja. Dalam jangka panjang ini eksplosif," tegas Capres dari Koalisi Perubahan. Anies juga mengatakan, jika korupsi dibiarkan, maka efeknya akan langsung ke rakyat. Dalam konteks tersebut, dia mencontohkan jalan raya yang dikorupsi yang pada akhirnya memberikan dampak negatif pada distribusi pangan.

"Kami melihat, bagaimana pun juga korupsi ini tetap harus diberantas. Nol belum tentu bisa, tapi ikhtiar pemberantasan harus terus dilakukan," tegas Anies dengan mantap.

Dia menambahkan bahwa kepemimpinan nasional harus mempunyai nilai, sehingga ketika ada kebijakan yang menyimpang, maka kepemimpinan akan paham kapan harus kembali, termasuk tentang pemerintahan yang bersih. Pada akhir sesi, di hadapan ribuan peserta baik dari warga Persyarikatan Muhammadiyah, mahasiswa, maupun masyarakat umum, Capres dan Cawapres nomor urut 1 ini mendapatkan kenang-kenangan yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof., Dr., Haedar Nashir, M.Si., berupa Kartu Anggota Kehormatan Muhammadiyah.

4. KESIMPULAN

Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti kembali dipilih oleh warga Muhammadiyah untuk memimpin organisasi ini sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal. Secara internal, berarti duet Haedar dan Mu'ti diakui berhasil menjalankan organisasi dengan baik. Bukan

saja dalam konteks memajukan Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan, tapi yang tidak kalah penting ialah bagaimana keduanya mampu menjaga posisi mandiri Muhammadiyah di antara kekuasaan dan kepentingan rakyat dengan cara yang santun.

Arah Muhammadiyah ke depan kelihatannya tidak akan bergeser dari posisi netral dalam urusan politik praktis, namun bersikap jelas dalam konteks etika kekuasaan dan berbangsa. Dengan berbekal sikap itulah selama ini Muhammadiyah tidak canggung menyampaikan pujian maupun kritik kepada pemerintah karena tidak memilik motif politik kekuasaan, apa lagi yang bersifat pragmatis, seperti untuk mendapatkan kursi di kabinet pemerintahan.

Muhammadiyah, di bawah kepemimpinan Haedar dan Mu'ti, selama ini berusaha menjaga jarak yang layak dengan kekuasaan—baik pemerintah, legislatif, maupun institusi yudikatif—agar mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagai organisasi kemasyarakatan secara semestinya. Bila waktunya mengkritik, mereka menyampaikan pikiran kritis secara proporsional. Bila saatnya memuji, mereka pun menyampaikan apresiasi selayaknya. Pendeknya, tidak ada kritik membabi buta dan tidak ada pujian yang menghamba. Sikap moderat yang bukan tidak berprinsip telah ditegakkan. Itulah wujud kematangan Muhammadiyah yang usianya kini mencapai 113 tahun, lebih tua dari usia Republik. Spirit demokrasi sekaligus musyawarah juga ditunjukkan dalam proses pemilihan ketua umum dan sekretaris jenderal. Tidak ada keriuhan, apa lagi keributan. Proses pemilihan yang berjalan lancar bukan berarti segala sesuatunya telah diatur agar yang terpilih Haedar dan Mu'ti. Proses yang cepat dan tanpa perselisihan itu memperlihatkan kematangan Muhammadiyah dalam memadukan demokrasi dan musyawarah di dalam praktik organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aanardianto** (2023). Menjelang Pemilu 2024 Haedar Nashir Tegaskan Kembali Pandangan Muhammadiyah Tentang Politik. Website: <https://muhammadiyah.or.id/menjelang-pemilu-2024-haedar-nashir-tegaskan-kembali-pandangan-muhammadiyah-tentang-politik/>
- Desta Leila Kartika, khoirul muzaki** (2023). Kemana Arah Politik Muhammadiyah di Pemilu 2024 Ini Jawaban Sekum Abdul Muti. okt 10, 2023, Website: <https://banyumas.tribunnews.com/2023/10/30/kemana-arrah-politik-muhammadiyah-di-pemilu-2024-ini-jawaban-sekum-abdul-muti>.
- Dian Basuki** (2022). Kemana Suara Muhammadiyah Mengalir di Pemilu 2024?. Nov 21, 2022, Website: <https://www.indonesiana.id/read/159853/kemana-suara-muhammadiyah-mengalir-di-pemilu-2024>
- Fika/Riz** (2023). Dialog Terbuka Muhammadiyah, Anies - Muhaimin Sampaikan Gagasan di UMS. Nov 22, 2023 Website: <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/dialog-terbuka-muhammadiyah-anies-muhaimin-sampaikan-gagasan-di-ums>
- Hikmawan Syahputra (2014). Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014 : Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang, Sept 10, 2014.

Kholifatul Husna (2023). Bukan Kontestan, Muhammadiyah Hadir di Kontestasi Politik 2024. Juni 22, 2023, Website: <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/06/bukan-kontestan-muhammadiyah-hadir-di-kontestasi-politik-2024/>

Wildan Noviansah (2023). Anwar Abbas Nyatakan Dukung Anies-Cak Imin, Tak Atas Nama Muhammadiyah. Des 01,2023, Website: <https://news.detik.com/pemilu/d-7067579/anwar-abbas-nyatakan-dukung-anies-cak-imin-tak-atas-nama-muhammadiyah>.